



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
GEDUNG KARYA LANTAI 12 S.D 17**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8  
JAKARTA - 10110

TEL. : 3811308, 3505006, 3813269, 3447017  
3842440  
Pst. : 4213, 4227, 4209, 4135

TLX : 3844492, 3458540  
FAX. : 3811786, 3845430, 3507576

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
NOMOR : UM.008/87/1/DPPL-15**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYEMPURNAAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERSYARATAN  
PEMBENTUKAN BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PADA DIREKTORAT KENAVIGASIAN**

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pelayanan perizinan kepada pengguna jasa, maka perlu dibentuk Badan Layanan Umum di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
  - b. bahwa dalam rangka pembentukan Badan Layanan Umum di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, perlu membentuk Tim Pendirian Badan Layanan Umum di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
  - c. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk duduk dalam keanggotaan Tim dimaksud;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
  6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden;
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 87 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2013;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KU. 707/1/1/DJPL-15 Tanggal 7 Januari 2015 tentang Pemberhentian dengan hormat Pengelola Anggaran Tahun 2014 dan Penunjukan/Pengangkatan Pengelola Anggaran pada kantor pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYEMPURNAAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERSYARATAN PEMBENTUKAN BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PADA DIREKTORAT KENAVIGASIAN.**
- PERTAMA :** Membentuk Tim Penyempurnaan Penyusunan Dokumen Persyaratan Pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Kajian Pendirian sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri dari Kelompok Kerja yang mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap persyaratan pembentukan Badan Layanan Umum terkait;
  2. Menyusun dan merumuskan konsep materi muatan Badan Layanan Umum terkait di tingkat Kementerian Perhubungan;

3. Menyiapkan bahan-bahan untuk keperluan pembahasan Badan Layanan Umum;
4. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dan melaporkan secara berkala mengenai perkembangan pembahasan Badan Layanan Umum kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut/Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA  
pada tanggal 12 November 2015

**AN. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL**

TTD

**BOEDHI SETIADJID, SH, MM**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19580722 198303 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
4. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
5. Para Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
6. Yang bersangkutan.

**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM**



**F. ZULISTIAN SH, MSI**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19670213 199403 1 001

- g. Bagian Hukum Ditjen Hubla
  - 1) F. Zulistian, SH, MSi
  - 2) Djoko Pujiyanto, SH, MH
  - 3) Amalia Katris H., SH
  - 4) Muhammad Kaulam, SH
- h. Bagian Perencanaan Ditjen Hubla
  - 1) Ir. Zahara Saputra
  - 2) Ferdy Tristanto K, ST
  - 3) Defi Sih Dwi
- i. Bagian Keuangan Ditjen Hubla
  - 1) M. Bahsan Arifin
  - 2) Retno Wijayanti
  - 3) Fanda Lokmanowati
- j. Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Pinang
  - 1) Drs. Bambang Purwanto
  - 2) Jaka Sugiya, S.Sos, M.Si
  - 3) Maryanto
- k. Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok
  - 1) Drs. Eko Hadi Rumekso, MBA
  - 2) Dra. Inayatur Robbany, M.Si, M.MTr
  - 3) Indra Santosa, SE, M.MTr
- l. Distrik Navigasi Kelas I Surabaya
  - 1) Ir. I Nyoman Sukayadnya, MM
  - 2) H. Indrawand, SE
  - 3) Arief Widodo, ST
- m. Distrik Navigasi Kelas I Dumai
  - 1) Dr.Ir. Johny Malisan, DESS
  - 2) Aofun Suroso, ST
  - 3) Suroto, A.Md
- n. Distrik Navigasi Kelas I Samarinda
  - 1) Taufiq Mansyur, SE
  - 2) Agus Widoyoko, SH
  - 3) Hendrik
- o. Distrik Navigasi Kelas II Banjarmasin
  - 1) Capt. Hidayat, M.Mar
  - 2) Agus Wahono, S.AP
  - 3) Edi Sumardiono, St

**AN. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL**

TTD

**BOEDHI SETIADJID, SH, MM**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19580722 198303 1 001

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut  
Nomor :  
Tanggal :

**SUSUNAN TIM PEMBENTUKAN TIM PENYEMPURNAAN PENYUSUNAN DOKUMEN  
PERSYARATAN PEMBENTUKAN BADAN LAYANAN UMUM (BLU)  
PADA DIREKTORAT KENAVIGASIAN**

---

1. Pengarah : Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
2. Ketua : Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
3. Wakil Ketua : Direktur Kenavigasian
4. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum.
5. Anggota

a. Direktorat Kenavigasian

- 1) Ir. Rasman Ginting Munte, MSTr
- 2) Pamuji Premadi, SE, MM
- 3) Rifanie Komara, ST, MSc
- 4) Moch. Arianto Wibowo, SE
- 5) Prayitno

b. Biro Perencanaan

- 1) Boedy Santoso
- 2) Rina Wahyu Jatiningsih
- 3) Risha Try Gusthantiyah
- 4) Sandy Ratna P

c. Biro Kepegawaian dan Organisasi

- 1) Bambang Wijonarko
- 2) Retno Dewayani
- 3) Hendro Purnomojati

d. Biro Keuangan dan Perlengkapan

- 1) Ciskaningtyas H, SE, MMtr
- 2) Didik Marsudi W.W, SE
- 3) Indriati, SE, MM
- 4) Irwandi, S.Kom.M.Eng
- 5) Unggul Djatmiko, SH
- 6) Mariska Uli Imerlin, SE
- 7) Anton Heru Prawoko, SE
- 8) Siti Aluyah, SE.AK,CA
- 9) Marhenny Mulyaningsih

e. Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri

- 1) Prawoto, SH
- 2) Safriyadi, SH, MH
- 3) Iko Wiwiko
- 4) Leonardo

f. Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi

- 1) Radjalis
- 2) Toni Tauladan, Ssi, MT
- 3) Azhar Setiawibawa, ST, MT